

Makalah

REFORMASI PEMERINTAHAN

Makalah disajikan pada
Seminar Akademik dalam rangka HUT ke-1 Kota Tasikmalaya,
tanggal 19 Oktober 2002, di Kampus STISIP Tasikmalaya.

Oleh

Pipin Hanapiah, Drs.
NIP. 131832050



JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FISIP UNPAD

BANDUNG
2002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas rahmat Tuhan Yang Mahaesa, makalah tentang “**Reformasi Pemerintahan**” telah selesai disusun kembali.

Makalah ini pernah disajikan pada “Seminar Akademik dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-1 Kota Tasikmalaya” pada tanggal 19 Oktober 2002 di Kampus STISIP Tasikmalaya. Makalah yang disusun-kembali ini diajukan oleh penyusun untuk memenuhi kenaikan jabatan dan pangkat sebagai dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (FISIP UNPAD) yang setara dengan Golongan IV/b.

Demikian makalah ini ditulis dan semoga dapat memenuhi ajuan dimaksud.

Bandung, 26 November 2002

Penyusun,

Pipin Hanapiah, Drs.

NIP. 131832050

Makalah

REFORMASI PEMERINTAHAN

Makalah disajikan pada
Seminar Akademik dalam rangka HUT ke-1 Kota Tasikmalaya,
tanggal 19 Oktober 2002, di Kampus STISIP Tasikmalaya.

Oleh

Pipin Hanapiah, Drs.
NIP. 131832050

Menyetujui:
Dosen Senior,

Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., M.A.
NIP. 131408365

DAFTAR ISI

Persetujuan Dosen Senior	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
A. Pendahuluan	1
B. Perbedaan Formasi Kabupaten dan Kota	2
C. Tantangan Pemerintahan Kota sebagai Daerah Otonom	4
D. Reformasi Pemerintahan	6
H. Daftar Pustaka	8

Reformasi Pemerintahan*

Pipin Hanapiah**

A. Pendahuluan

Kota Tasikmalaya, yang semula berstatus Kota Administratif Tasikmalaya di wilayah Kabupaten Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat, pada tanggal 17 Oktober 2002 telah menjadi ‘*seorang bayi*’ berusia 1 tahun, yang kelahirannya secara *prematuur* melalui *operasi-sesar(?)*. Mengapa begitu? Sebab, ia terlahir berdasar pada UU 10/2001 (diundangkan 21 Juni 2001) yang diberi *akta-kelahiran* oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sehingga resmi menjadi daerah otonom pada tanggal 17 Oktober 2001. UU ini keluar lebih karena atas dasar perintah UU 22/1999—tentang Pemerintahan Daerah—daripada atas dasar pertimbangan objektif-empiris pada terpenuhinya kualifikasi untuk menjadi sebuah Kota. Kalau tidak menjadi Kota, ia harus kembali menjadi sebuah Kecamatan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Itu kalimat sederhana yang dimaksud oleh UU 22/1999.

Apakah kritikan itu akan diterima atau ditolak? Diharapkan, dapat diterima secara positif sebagai tantangan kita bersama. Apa saja tantangannya?

* Makalah pada Seminar Akademik dalam rangka HUT ke-1 Kota Tasikmalaya, tanggal 19 Oktober 2002 di Kampus STISIP Tasikmalaya.

** Lektor Kepala dalam *Metodologi Ilmu Politik/Pemerintahan* pada FISIP UNPAD, Bandung.

Tentu saja berkisar pada 3 bidang pertimbangan-prematur ditingkatkannya status menjadi Kota Tasikmalaya: (1) penyelenggaraan pemerintahan, (2) pelaksanaan pembangunan, dan (3) pelayanan kemasyarakatan yang ketika itu—bahkan diduga sampai kini—masih jauh dari memenuhi syarat. Kalau itu sebagai tantangan, bagaimana refleksi untuk mereformasi pemerintahannya? Reformasi pemerintahan dijadikan fokus pembahasan mengingat faktor inilah yang paling mungkin untuk mengatasi ketiga pertimbangan-prematur tersebut.

B. Perbedaan Formasi Kabupaten dan Kota

Formasi sosial kemasyarakatan sebuah kabupaten pada umumnya dapat diidentifikasi pada hal-hal berikut:

- 1) Perilaku masyarakat terhadap pemimpinnya yang lebih bersifat paternalistik;
- 2) Pola dan proses pembangunannya lebih menekankan pada *top-down leadership*;
- 3) Pembentukan watak dan kepribadian sosialnya lebih mengandalkan pada pembinaan, pengarahan, dan penasehatan;
- 4) Keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan fisik dan nonfisiknya yang lebih banyak atas dasar mobilisasi dari pemerintahnya dalam bentuk padat-karya;
- 5) Sifat hubungan sosial antarsesamanya lebih bermotivasi gotong-royong dan kekerabatan/kekeluargaan;

- 6) Motivasi kerja berpemerintahan masih dilekati oleh atas dasar pengabdian dengan imbalan yang relatif diterima apa adanya;
- 7) Proses penyerapan/penyaluran aspirasi masyarakatnya yang lebih cenderung monolog dan penafsiran-oleh-tokoh;
- 8) Dan seterusnya.

Sebaliknya, formasi sosial kemasyarakatan sebuah kota pada umumnya dapat diidentifikasi pada hal-hal berikut:

- 1) Perilaku masyarakat terhadap pemimpinnya yang lebih bersifat egalistik;
- 2) Pola dan proses pembangunannya lebih menekankan pada *bottom-up leadership*;
- 3) Pembentukan watak dan kepribadian sosialnya lebih mengandalkan pada kreativitas dan proaktivitas;
- 4) Keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan fisik dan nonfisiknya lebih banyak atas dasar partisipasi yang seringkali dipertimbangkan positif-negatifnya bagi diri dan lingkungannya;
- 5) Sifat hubungan sosial antarsesamanya lebih bermotivasi pada hubungan profesi, sehingga lebih didasarkan pada kebutuhan daripada kebiasaan;
- 6) Motivasi kerja berpemerintahan lebih banyak dilekati oleh atas dasar usaha/ikhtiar imbalan yang relatif ingin terus membaik;
- 7) Proses penyerapan/penyaluran aspirasi masyarakatnya yang lebih cenderung dialog dan kritik-kontrol;
- 8) Dan seterusnya.

Kedua formasi itu disajikan secara hipotesis-diametral, seakan-akan begitulah kenyataannya. Sajian itu sengaja seperti itu dengan maksud untuk melihat secara hitam-putih: *Berada di posisi lebih dekat ke formasi manakah Kota Tasikmalaya?* Bila lebih dekat ke formasi sosial kemasyarakatan kabupaten, berarti *Kota Tasikmalaya perlu direformasi?*

C. Tantangan Pemerintahan Kota sebagai Daerah Otonom

Tantangan dari konsekuensi sebuah daerah otonom berupa Kota—apalagi di era globalisasi seperti saat ini—akan sangat variatif. Beberapa di antaranya adalah:

- 1) Berhasil-tidaknya penyelenggaraan pemerintahan akan dapat diukur pada **kinerja pemerintahannya** dalam pelaksanaan pembangunan. Kinerja ini sekurang-kurangnya diukur oleh tingkat *efektivitas, efisiensi, dan produktivitas* (EEP), yang nantinya diakhiri oleh ukuran *akuntabilitas-publik*. Akuntabilitas-publik akan dengan mudah diketahui karena di sebuah Kota akan menguat secara akumulatif adanya *kontrol-publik*. Kontrol publik ini pada umumnya akan berasal dari masyarakat-terpelajar (mahasiswa), LSM/Ornop, Ormas, partai politik, pers, dan komunitas-bisnis.
- 2) Didukung-tidaknya program penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Tasikmalaya akan dapat diukur pada **kualitas kebijakan publik** yang dibuat oleh Walikota dan DPRD Kota. Kalau setiap kebijakan

publik yang dibuat itu didasarkan pada aspirasi publik, dibuat bersama-sama publik, dan untuk kepentingan publik; adalah suatu niscaya Pemerintah Kota akan menikmati ‘enaknya-tidur’. Batasan publik sangat relatif, sekurang-kurangnya mayoritas Anggota/Fraksi pada DPRD Kota, mayoritas warga, atau tidak ditolak melalui demo-massa.

- 3) Kuat-tidaknya legitimasi warga kepada Pemerintah Kota dan DPRD Kota di Tasikmalaya akan dapat diukur pada kepuasan warga pada **pelayanan publik** yang khususnya dilakukan oleh Pemerintah Kota. Pelayanan publik adalah yang bersubstansi pada pelayanan publik-kota, pelayanan standar-kota, pelayanan kualitas-kota, pelayanan waktu-kota, pelayanan teknologi-kota. Ini di satu sisi, yang seakan-akan penilaian itu akan selalu dikembalikan pada ‘baju-kota’. Di lain sisi, suatu konsekuensi yang logis apabila ongkos-pelayanan publiknya pun berupa ‘rupiah-kota’, yaitu yang sewajarnya relatif lebih mahal. Mahal itu adalah baju-kota juga.

Sudahkah di hari ulang tahun yang pertama ini Pemerintah Kota Tasikmalaya seperti itu? Bila belum, sudah punya rencanakah ke arah seperti itu? Bila belum juga, berarti Pemerintah Kota perlu **mereformasi** diri atau justru perlu **direformasi**.

D. Reformasi Pemerintahan

Bagaimana cara mereformasinya? Tulisan ini hanya sebagai satu versi pendapat dari seorang Warga Negara Indonesia (WNI)—tetapi bukan warga Kota Tasikmalaya—yang sewaktu-waktu suka menikmati rizkinya Kota Tasikmalaya.

Untuk menikmati kotanya Kota Tasikmalaya di masa depan, istilah reformasi pemerintahan perlu menjadi fokus prioritas karena alasan-alasan: (1) formasi (bidang/urusan) pemerintahan yang selama ini ada dan berjalan perlu diformasi-ulang/diformasi-kembali (*re-formation*), (2) reformasi pemerintahan ini menjadi prioritas, karena ia yang menjadi ‘pemimpin-reformasi’ untuk bidang/urusan lainnya, (3) pemimpin ini yang menjadi pokok, karena ia yang harus mengatur, mengarahkan, memfasilitasi, melayani, dan menindak.

Struktur lembaga-lembaga pemerintahan pada umumnya perlu dibuat serasional, seefisien, seteknologis mungkin. Ini perlu untuk memudahkan pelayanan publik, sehingga dapat mendorong tingkat kesejahteraan publik yang lebih berkualitas. Konstruksi struktur pemerintahan yang terkesan mengada-ada sehingga bersifat ‘gemuk’ dan tumpang-tindih dalam kewenangan/fungsi, hanya dengan alasan untuk mengakomodasi banyaknya kepentingan atau kelompok masyarakat sangat perlu untuk dihindarkan.

Kualitas sumberdaya aparat pemerintahan perlu diarahkan pada karakter yang berorientasi cara-berpikir dan cara-kerja profesional. Orientasi seperti ini di antaranya seperti yang efektif, efisien, produktif, bertanggungjawab,

jujur, transparan, serta berdisiplin-waktu dan berdisiplin-mutu. Ini bisa dioptimalkan apabila sistem rekrutasi dan promosi pegawainya berbasis kualifikasi dan prestasi. “Siapa yang terbaik, dialah yang berhak” perlu disosialisasikan dan ditradisikan oleh Pemkot Tasikmalaya, yang pelaksanaannya perlu terus dikontrol oleh publik. Kinerja DPRD-Kota dalam hal memberi pertimbangan pada proses promosi jabatan-jabatan-pemerintahan yang strategis perlu dikontrol oleh publik/warga Kota.

Sifat dan karakter masyarakat-kota di era globalisasi informasi seperti saat ini akan lebih menguat pada orientasi dan perilaku yang berpikir rasional-kritis, bersikap individual-materialis, dan berperilaku kompetitif-instan.

Struktur lembaga pemerintahan, kualitas aparat pemerintahan, serta sifat dan karakter masyarakat yang saling berhadapan itu perlu dikelola oleh Pemerintah Kota bersama-sama dengan DPRD Kota. Pengelolaan ini perlu bersinergi dan berkonsensus untuk saling mendukung dalam kerangka *good and clean governance*. Dalam mengelola kota, tidak perlu untuk tidak mau mendalami manajemen konflik. Apalagi Kota Tasikmalaya memiliki tradisi agamis. Tradisi ini akan sangat efektif sebagai alternatif dalam mengatasi tantangan global yang semakin nekad dan irrasional(?). Pemerintah dan Warga Kota Tasikmalaya harus sudah mau dan dapat mengantisipasi bila suatu saat nanti, produk apa pun yang akan diekspor ke luar negeri ditolak hanya karena bahan, proses, dan kualitas produksinya tidak sesuai dengan standar WTO (*World Trade Organization*) atau yang lainnya.

Dirgahayu Kota Tasikmalaya....

E. Daftar Pustaka

- Blondel, J.**, 1995, *Comparative Government: An Introduction* (Second Ed.), PrenticeHall H.W.: London.
- Chilcote, Ronald H.**, 1984, *Theories of Comparative Politics: The Search for a Paradigm Reconsidered*, Westview Press: San Francisco.
- Dahl, Robert A.**, et. all, 2003, *The Democracy Sourcebook*, The MIT Press: London.
- Dunleavy, Patrick and Brendan O’Leary**, 1987, *Theories of the State: The Politics of Liberal Democracy*, London: The MacMillan Press Ltd.
- Dworkin, Ronald**, 2002, *Sovereign Virtue: The Theory and Practice of Equality*, Harvard University Press: London.
- Gandhi, Madan G.**, 1984, *Modern Political Theory*, Oxford & IBH P.C.: N.D.
- Held, David**, 2004, *Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance*, Polity Press: U.K.
- Johari, J.C.**, 1987, *Contemporary Political Theory* (Revised and Enlarged Ed.), S.K. Ghai: N.D.
- LAN-BPKP**, 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance*, Jakarta: LANRI.
- Manan, Bagir**, 2002, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Jogjakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Hukum UII.
- Osborne, David dan Ted Gaebler**, 1996, *Mewirusahaakan Birokrasi*, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Sartori, Giovanni**, 1997, *Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, Incentives, and Outcomes* (2nd Ed.), New York University Press: N.Y.
- Sedarmayanti**, 2003, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*, Bagian Kedua, Bandung: Mandar Maju.
- Spiro, Herbert J.**, 1969, *Responsibility in Government: Theory and Practice (New Perspective in Political Science)*, Van Nostrand Reinhold Company: N.Y.
- Tjokroamidjojo, Bintoro**, 2000, *Good Governance: Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*, Jakarta: UI Press.
- Setjen MPR-RI**, 2002. *UUD 1945 dan Perubahannya*, Jakarta.
- Widodo, Joko**, 2001, *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cendikia.